

**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Palembang**



Skripsi Oleh :

Johannes Marale Sihonabing

01081002078

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

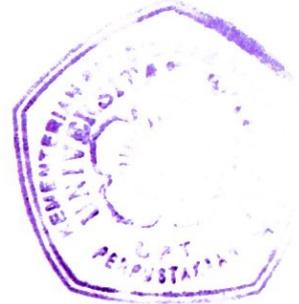
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2014

2334/2014

352.135A07
Sib
P
2014
G 141458

**Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan
Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kota Palembang**



Skripsi Oleh :

Johannes Marale Sihombing

01081002078

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih

Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) dan
PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH(PAD) di KOTA PALEMBANG

Disusun oleh :

Nama : Johannes Marale Sihombing

NIM : 01081002078

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua

Tanggal : 22 Maret 2014



Drs. H. Tadjuddin, M.Sc
NIP. 195211261980121001
Anggota

Tanggal : 19 Maret 2014



Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si
NIP. 195401031983032001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Johannes Marale Sihombing
NIM : 01081002078
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Kosentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 03 April 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

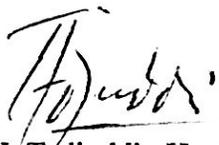
Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 03 April 2014

Ketua

Anggota

Anggota



Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc
NIP. 195211261980121001



Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si
NIP. 195401031983032001



Prof. Dr. H. Didik S, M.Si
NIP. 196007101987031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Azwardi, S.E, M.Si
NIP 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johannes Marale Sihombing

NIM : 01081002078

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang

Pembimbing :

Ketua : Drs. H. Tadjuddin, M.Sc

Anggota : Dra. Hj. Eka Rostartina, M.Si

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

Tanggal Ujian : 03 April 2014

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjanaan.

Inderalaya, 03 April 2014

Pembuat Pernyataan,



Johannes Marale Sihombing
NIM 01081002078

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel independennya yaitu PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap perubahan nilai variabel dependennya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode penelitian. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing yakni bapak Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc dan Dra. Hj. Eka Rostartina, M. yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan yakni bapak Dr. Azwardi, SE, M.Si
3. Sekretaris Jurusan yakni bapak Nazeli Adnan, SE, M.Si
4. Dosen penguji yakni Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si yang memberikan saran.
5. Kedua Orangtua saya bapak St. A. Sihombing (+) dan Mamak R. Br. Sibarani.

Inderalaya, April 2014

Penulis,

Johannes Marale Sihombing
NIM 01081002078

ABSTRAK

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) di KOTA PALEMBANG

Oleh :
Johannes Marale Sihombing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 1997 hingga tahun 2013, yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa (*method of ordinary least squares*). Pada penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah variabel terikat, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengeluaran Pembangunan merupakan variabel bebas. Data ini diproses dengan menggunakan program E-views 6.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai hasil regresinya 3,412382 dan Pengeluaran Pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai hasil regresinya 0,014821 di Kota Palembang.

Kata Kunci : *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pengeluaran Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

Riwayat Hidup

Nama : Johannes Marale Sihombing
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Maret 1990
Agama : Kristen Protestan
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jalan D. I. Panjaitan Lr. Sikam RT 20 RW 05 No. 942 Plaju, Palembang
Alamat Email : joehombink@yahoo.com
Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar : SD XAVERIUS VIII Plaju
SMP : SMP YKPP 1 Plaju
SMA : SMA Negeri 4 Palembang

Pendidikan Non Formal : - Pendidikan Komputer di LAMI Komputer Palembang

Pengalaman Organisasi :
- Anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) Tahun 2008
- Anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palembang Tahun 2010
- Ketua Remaja Naposo HKBP Plaju tahun 2012-2014
- Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palembang Tahun 2011 – 2013
- Sekretaris Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Palembang Tahun 2013-2015



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	12
2.1.2. Teori Pertumbuhan Klasik	15
2.1.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern	16
2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto	17
2.1.5. Pengeluaran Pembangunan	21
2.1.6. Teori Pengeluaran Pemerintah	26
2.1.7. Pendapatan Asli Daerah	31
2.1.8. Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah	34

2.2. Penelitian Terdahulu	35
2.3. Kerangka Pemikiran	41
2.4. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	43
3.2. Sumber Data	43
3.3. Teknik Analisis Data	44
3.3.1. Uji regresi Linear Berganda	44
3.3.2. Uji Statistik	44
3.3.2.1. Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R^2) .	44
3.3.2.2. Uji F	45
3.3.2.3. Uji t	45
3.3.3. Uji Asumsi Klasik	46
3.3.3.1. Uji Normalitas	46
3.3.3.2. Uji Multikolinieritas	47
3.3.3.3. Uji Autokorelasi	47
3.3.3.4. Uji Heteroskedastisitas	48
3.3.4. Analisis Elastisitas.....	48
3.4. Batasan Variabel	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Gambaran Umum Variabel Penelitian	50
4.1.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang	50
4.1.2. Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Kota Palembang	54
4.1.3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang	56
4.2. Analisis dan Pembahasan	60
4.2.1. Teknik Pengujian Model	61

4.2.1.1. Uji Akar-akar (Unit Root Test)	61
4.2.1.2. Uji Integrasi	62
4.2.1.3.a. Koefisien Determinasi R^2	63
4.2.1.3.b. Model Estimasi Regresi Linier Berganda.....	63
4.2.1.4. Uji F.....	64
4.2.1.5. Uji t.....	65
4.2.2. Uji Asumsi Klasik	67
4.2.2.1. Uji Normalitas	67
4.2.2.2. Uji Multikolinieritas	68
4.2.2.3. Uji Autokorelasi	69
4.2.2.4. Uji Heterokedastisitas	70
4.2.3. Analisis Koefisien Hasil Estimasi Berganda.....	71
4.2.3.1. Analisis Koefisien Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.....	71
4.2.3.2. Analisis Koefisien Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.....	71
4.2.4. Elastisitas.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Saran	76
Daftar Pustaka	77
Lampiran-lampiran	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan 2000, Pengeluaran Pembangunan dan PAD (Juta Rp)	8
Tabel 4.1 Perkembangan PDRB Menurut Harga Konstan dalam Pendapatan Setiap Sektor (Juta Rupiah) Tahun 200, 2008, dan 2012	51
Tabel 4.2 Perkembangan PDRB Kota Palembang Berdasarkan atas Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 1997-2013 (Juta Rupiah)	52
Tabel 4.3 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Kota Palembang tahun 1997-2013 (Juta Rupiah)	54
Tabel 4.4 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 1997, 2008, dan 2012 (Juta Rupiah)	57
Tabel 4.5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 1997-2013 (Juta Rupiah)	58
Tabel 4.6 Hubungan Perkembangan PDRB, Pengeluaran Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang Tahun 1997 sampai 2013 (Juta Rupiah)	61
Tabel 4.7 Hasil Uji Akar-akar Unit (<i>Second Difference</i>) <i>Augmented Dickey-Fuller</i>	62

Tabel 4.8 Hasil Estimasi Variabel PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap PAD	64
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	69
Tabel 4.10 Hasil Uji Heterokedastisitas	70
Tabel 4.11 Hasil Penghitungan Elastisitas PDRB dan Pengeluaran Pembangunan Kota Palembang Tahun 1997-2013.....	72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	28
Gambar 2.2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	30
Gambar 3.1 Uji t-statistik	46
Gambar 4.1 Perkembangan PDRB Kota Palembang	53
Gambar 4.2 Perkembangan Pengeluaran Pembangunan Kota Palembang	56
Gambar 4.3 Perkembangan PAD Kota Palembang.....	60
Gambar 4.4 Uji t-statistik Variabel PDRB.....	66
Gambar 4.5 Uji t-statistik Variabel Pengeluaran Pembangunan.....	67
Gambar 4.6 Uji Normalitas	68

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Hasil uji akar.....	80
Lampiran 2 Hasil Regresi linier Berganda.....	89
Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas.....	89
Lampiran 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	90
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolineritas.....	90

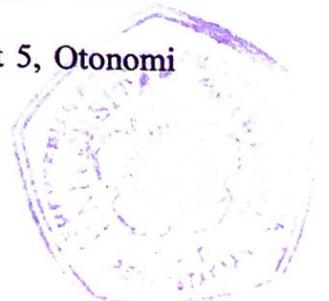
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan Indonesia adalah pembangunan di semua bidang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjadikan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan serta meningkatkan stabilitas Negara Indonesia. Untuk mencapai dari setiap tujuan yang di inginkan tersebut, pemerintah Indonesia harus menggunakan kekuatannya sendiri, diantara lain dengan menggunakan potensi – potensi yang ada di dalam negeri, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia teknologi dan skil. Potensi-potensi tersebut haruslah di gali, diolah dan ditingkatkan penggunaannya secara lebih efisien dan efektif agar menjadi kekuatan yang nyata untuk mencapai tujuan dari program pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses / perubahan yang terus menerus dan usaha suatu Negara untuk memperbesar atau meningkatkan pendapatan perkapita (Amalia, 2007: 2).

Untuk mengembangkan dan mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk membangun dan mencapai tujuan pembangunan di segala bidang dengan otonomi daerah. Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, Otonomi



daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi (Fahmi, 2009: 14)

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Saddat, 2004: 1).

Tujuan sebenarnya dari otonomi daerah adalah membangun kreatifitas dan inovasi untuk mencapai kemajuan di daerah pada khususnya dan Indonesia pada

umumnya. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah tersebut, sehingga suatu daerah diharapkan dapat menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri (Saddat, 2004: 3).

Dalam pembenahan dan alternatif kebijakan, diperlukan adanya pemberian keleluasan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah melalui Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah (Depkeu, 2008: 2).

Sumber-sumber penerimaan daerah mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintah yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (*money follow function*) (Yuwono, 2008: 46)

Sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di daerah dengan kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah

yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang retribusi daerah Dan PP Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi daerah sampai saat ini terjadi ketimpangan yang relatif besar terhadap distribusi kewenangan perpajakan antara pusat dan daerah yang tercermin dari jumlah penerimaan pajak yang tidak berdampak besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pembiayaan kebutuhan di sebagian besar daerah pada kenyataannya hanya memiliki PAD kurang dari 10 persen dan hal ini sangat bervariasi di setiap daerah yakni antara 10 % - 5 % karena kewenangan perpajakan (*taxing power*) daerah sangat terbatas dan akhirnya akan bermuara pada rendahnya kemampuan keuangan daerah (Yuwono, 2008: 47).

Secara umum untuk meningkatkan Penerimaan Asli Daerah dapat dicapai dengan jalan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat terutama yang berkaitan dengan objek-objek pajak dan retribusi. Peningkatan tingkat kegiatan ekonomi akan menaikkan tingkat investasi yang pada akhirnya produktifitas daerah bertambah, dengan begitu Produk Domestik Bruto (PDRB), artinya PDRB secara tidak langsung bisa digunakan sebagai indikator dalam menilai hasil kegiatan pembangunan ekonomi daerah (Yuwono, 2008: 48).

Peningkatan kualitas hidup penduduk di suatu daerah juga perlu dukungan dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada akhirnya

memungkinkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh penduduk agar menjadi manusia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan yang akan dilaksanakan di suatu daerah juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya yang dicapai di suatu daerah tersebut. Indikator kinerja makro untuk bidang ekonomi yang sering digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Arief, 2012: 1).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang terus meningkat dan dinamis yang bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang berpotensi besar. Pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan bidang lainnya serta sebagai kekuatan utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (Nahrahwi, 2005; 1).

Pembangunan ekonomi suatu daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (*Endogenous Development*), dengan menggunakan potensi sumber daya lokal. Dalam kerangka tersebut pembangunan ekonomi ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Arsyad, 1999; 298).

Dalam era sekarang ini pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah dan dengan menggunakan sumber daya yang ada mampu menaksir potensi sumber daya yang dimiliki untuk dipergunakan menyusun model pembangunan ekonomi yang paling sesuai dengan daerah tersebut. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda-beda. Penerapan secara mentah-mentah pola kebijakan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaa yang sama bagi daerah lainnya sehingga kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi baik itu masalah, kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan karena daerah memiliki potensi yang berbeda baik potensi kandungan sumber daya alam maupun geografinya (Pebrina, 2005; 2).

Model pembangunan daerah yang diterapkan pada kawasan-kawasan pengembangan merupakan salah satu alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia, dengan pertimbangan utama adalah berbagai kendala terutama kemampuan dana untuk pembangunan. Dalam skala kecil model tersebut diterapkan pula di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota (Nahrawi, 2005;4). Skala yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah dalam sistem ekonomi, administrasi dan pelayanan umum berakibat fungsi dari wilayah tersebut berbeda-beda pula dalam pola harmonisasi yang mampu saling menunjang peran wilayah satu dengan wilayah lainnya. Selain itu sebagai wilayah baru, sangat

penting juga untuk mengetahui bagaimana kinerja perekonomian, pola struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi baik secara wilayah (posisi relatif) maupun secara sektoral (antar sektor) dan bagaimana pola tingkat spesialisasi perekonomian di kota Palembang dapat berkembang dengan baik serta mampu bersaing dengan kabupaten/kota lainnya (Budianto, 2007; 8).

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi atau yang lebih umum dikenal dengan peranan sektor publik telah menjadi suatu analisis yang penting dan sangat menarik. Berdasarkan alasan teoritis, terdapat beberapa pendapat yang kontroversi terhadap peranan sektor publik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang mantap dalam jangka panjang. Pandangan umum adalah pengeluaran pemerintah khususnya pada *human capital* dan infrastruktur fisik dapat mempercepat pertumbuhan (*growth-reterding*), sehingga pengeluaran pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengingat salah satu komponen dalam permintaan agregat (*aggregate demand –AD*) adalah pengeluaran pemerintah. Secara teori dinyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka permintaan agregat akan meningkat (Putriani, 2011; 10).

Pada umumnya pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan perekonomian suatu negara/wilayah. Keadaan ini dapat dijelaskan dalam kaidah yang dikenal sebagai Hukum Wagner yaitu mengenai adanya korelasi positif antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat pendapatan nasional. Walaupun demikian peningkatan pengeluaran pemerintah yang besar belum tentu berakibat baik terhadap aktivitas perekonomian, untuk itu perlu

dilihat efisiensi penggunaan pengeluaran pemerintah. faktor penentu besarnya pengeluaran pemerintah diantaranya faktor penduduk, bertambahnya jumlah penduduk menjadi pertimbangan pengalokasian dana dalam jumlah tertentu untuk memenuhi dan melayani kebutuhan dari tambahan jumlah penduduk tersebut (Putriani, 2011; 12).

Di lihat dari kondisi ekonomi, perekonomian di kota Palembang cukup baik, hal ini dapat dilihat pada table 1.1 berikut :

Tabel 1.1 PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 (Juta Rp), Pengeluaran Pembangunan dan PAD

Tahun	PDRB Dengan Migas	Pengeluaran Pembangunan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2000	-	35.771,99	20.386,91
2001	10.330.116	104.342,40	35.510,30
2002	10.895.983	95.685,42	51.292,42
2003	11.448.473	44.678,37	63.522,97
2004	12.226.258	35.408,61	61.586,18
2005	13.089.463	47.613,01	78.714,19
2006	13.999.693	133.079,93	89.676,05
2007	14.998.693	69.346.447,00	123.129,85
2008	16.037.922	64.644.783,00	139.154,27
2009	16.936.204	250.954.000,00	196.108,00
2010	18.053.204	248.045.000,00	224.461,00

Sumber : BPS, Palembang Dalam Angka Tahun 2011, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa PDRB kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 dengan migas mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga 2010 rata-rata sebesar 6,40 persen. Pada tahun 2001 PDRB kota Palembang tercatat sebesar Rp. 10.330.116, tahun 2006 sebesar Rp. 13.999.693 dan melonjat naik menjadi Rp. 18.053.204 pada tahun 2012.

Dari fenomena dan permasalahan yang di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap PAD di Kota Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Berapa besar pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang ?
2. Bagaimana Elastisitas PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besar potensi pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang
2. Untuk mengetahui Elastisitas pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat penulis ambil dari penelitian ini ada dua, yaitu :

- Manfaat teoritis :

1. Mengetahui besarnya pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.
2. Mengetahui Elastisitas pengaruh PDRB dan Pengeluaran Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang.
3. Dapat memberikan kontribusi yang dapat dipakai sebagai referensi dalam mengembangkan ilmu ekonomi.

- Manfaat Praktis

Dapat dipakai sebagai kajian bagi pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Bab V Kesimpulan dan Saran.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PENELITIAN

Menguraikan landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan mencoba menarik suatu hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan analisis deskriptif dan objek penelitian, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan dan keterbatasan dari penelitian dan saran- saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Albeli, R. 2008. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pengeluaran pemerintah Tahun Sebelumnya Terhadap Pengeluaran Pemerintah Kota Pagaralam. Skripsi.* Universitas Sriwijaya. Sumatera Selatan. Tidak dipublikasikan.
- Amalia, Lia. 2007. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta. Graha Ilmu
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat.* Yogyakarta. Bagian penerbitan STIE YKPN.
- Bamin, Selamat. 2002. *Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi.* Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Sriwijaya.
- Budianto. 2007. *Analisis Potensi Sumsel Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu-Lampung-Jambi-Sumsel-Babel. Tesis PPS* Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan.
- Bustaman, Nawarti. 2004. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Propinsi Riau Tahun 1976-2000. Tesis USU* 2007. Diambil pada tanggal 22 Juni 2013 dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4168/1/04009987.pdf>.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* BPFE-Yogyakarta.
- Fahmi, sudi, Dr, SH, M.Hum. 2009. *Hukum Otonomi Daerah.* Yogyakarta. Kreasi Total Media.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPF AMP YKPN.
- Haryanto, Ronald. 2005. *Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2000-2002. Skripsi* Universitas Islam Indonesia. Diambil pada tanggal 22 juni 2013 dari <http://www.scribd.com/doc/59261145/Analisis-Pengeluaran-Pemerintah-Daerah>.
- Herta, 2007. *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah.* Jakarta; Erlangga.

- MangkoeSoebroto, Guritno. 1995. *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Nahrawi. 2005. *Identifikasi Ibukota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*. Tesis. PPS Universitas Sriwijaya Palembang. Tidak dipublikasikan.
- Pebrina, Intan. 2005. *Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*. Tesis PPS Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan.
- Putriani, Sri. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Periode 1999-2009*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rosmeli. 2010. *Analisis Peran Pemerintah Dalam Rangka Membiayai Pembangunan Daerah (Dilihat dari sisi PAD terhadap PDRB) Provinsi Jambi Tahun 2000-2008*. *Jurnal Ekonomi*. Volume 111. Edisi April 2010. ISSN: 0854-8986.
- Saddat, Anwar.A. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Dikota Palembang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi. Universitas Sriwijaya.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Susilo. 2000. *Sebuah Resep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendekatan ZOPP*. *Bulletin Lintas Ekonomi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Wijayanti, Sri. 2008. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sumbangan/Bantuan Pemerintah Pusat dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus*. Skripsi Stata 1 UNDIP. Tidak diterbitkan
- Tarigan, Robinson, Drs,M.R.P. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (H. Munandar, Trans. Edisi Ketujuh). Jakarta : Erlangga.
- Yani, Ahmad, SH, MM, Ak. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.

Yuliarmi, Ni Nyoman. 2008. *Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Propinsi Bali*. BULETIN STUDI EKONOMI Volume 13 Nomor 2 Tahun 2008 Denpasar: <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/yuliarni.pdf>. diakses 14 April 2013